KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (CYBER PROSTITUTION) DI INDONESIA

Alvionita Rhiza K (Alvionitarhiza@rocketmail.com) dan
Pramesthi Dyah S (sitaaribowo@yahoo.co.id)

Abstract

Activities based on internet technology is no longer a new matter in the society, the problem in this journal is how society responses, how can prostitution online happen and prevention of prostitution online, efforts to prevent and mitigate the crime of prostitution through the online medium can be done through the efforts of penal (criminal law) as well as the efforts of non-penal (outside the criminal law).

From the discussion above problems there is something interesting to be researched and studied as a way to describe and analyze how the causes of prostitution in the online media and its prevention. This study aims to determine how the setting along with the legal view of the sanctions and the prevention of the crime of prostitution is done with the online media.

This study uses normative research is secondary data , secondary data obtained in the form of legislation in force , can also be a skilled expert opinion on the issue presented in the literature both from books , scientific texts , and others.

Effect can be positive and negative. Based on this study it was found that the occurrence of cyber crime in which protitution can be run online, is looked one of the negative effects. In positive law in force in Indonesia , however until now there are very many online prostitution cases that occurred , according to the compilers of the case due to lack of traction on the rule of law and the lack of severity of the sanctions imposed on perpetrators.

Keywords : *Criminal offense, Prostitution, Online, Cybercrime*

Abstrak

Aktivitas berbasis teknologi internet, bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat, dimana yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini adalah mengenai bagaimana respon masyarakat, penyebab terjadinya prostitusi online beserta upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana prostitusi melalui media online itu dapat dilakukan melalui upaya penal (hukum pidana) maupun upaya non-penal (di luar hukum pidana).

Dari suatu pembahasan permasalahan di atas terdapat sesuatu yang menarik untuk diteliti dan dikaji sebagai jalan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penyebab terjadinya prostitusi dalam media online beserta pencegahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan beserta pandangan hukum tentang pemberian sanksi dan pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi yang dilakukan dengan media online.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu data sekunder, data sekunder yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat juga berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah ini yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, dan lain-lain.

Mengenai adanya dampak dari teknologi internet adalah dampak positif dan dampak negative. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa munculnya sebuah tindak pidana baru (*cybercrime*) yakni berupa prostitusi yang dapat dilakukan secara *online*, merupakan salah satu dampak negative. Yang diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, akan tetapi sampai sekarang masih banyak sekali kasus prostitusi online yang terjadi, menurut penyusun itu terjadi dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum dan kurang beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya.

Kata Kunci : Tindak pidana, Prostitusi Online, Cybercrime

A. Pendahuluan

Asal usul prostitusi (pelacuran) modern di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa kerajaan-kerajaan Jawa, dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan feodal. Dua kerajaan yang sangat lama berkuasa di Jawa berdiri tahun 1755 ketika kerajaan Mataram terbagi menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja yang tak terbatas ini juga tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang di serahkan kepada raja yang berasal dari persembahan kerajaan lain dan dari lingkungan masyarakat kelas bawah.¹(Lexy Moleong, 2002: 103)

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.²(Kartini Kartono, 1997: 177)

Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan.³(W.J.S Poerdarmita, 1984: 548)

Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*)⁴ untuk imbalan berupa uang.

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.⁵ (Terence H Hull dkk, 1997: 3) Dan semakin dengan adanya perkembangan jaman, praktek prostitusi pun merambah ke dunia maya, banyak situs-situs online yang ada di dunia maya yang berkedok hanya situs online biasa ternyata di dalamnya apabila ditelusuri menjajakan perempuan-perempuan dan banyak terjadi praktek prostitusi online di dalamnya yang sekarang sering disebut dengan (*cyber prostitution*).

Cyber prostitution merupakan bagian dari *cyber crime* yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Tindak pidana atau kejahatan mayantara adalah sisi buruk yang amat berpengaruh terhadap kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan teknologi informasi yang tanpa batas. Barda Nawawi Arief bahkan dengan tegas menggolongkannya sebagai *cyber crime* di bidang kesusilaan atau secara sederhana diistilahkan dengan *cyber sex*.

Faktor jauh dari keluarga dan kebebasan dari kehidupan desa serta adanya fasilitas-fasilitas hiburan di kota. Menarik para perempuan muda ini untuk masuk dalam dunia prostitusi.⁶ (Hull T dkk, 1997: 20) Industri seks di Indonesia menjadi semakin rumit bersamaan dengan meningkatnya mobilitas penduduk, gaya hidup, pendapatan masyarakat dan tantangan yang dihadapi. Pemanfaatan internet untuk transaksi seks, atau paling tidak mempromosikan diri para PSK, sesungguhnya bukan hal baru. Sudah sejak lama beberapa foto PSK seperti berasal dari lokasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur, menghuni dunia maya. Bahkan lewat fasilitas chatting, info yang beredar di mailing list mengenai perempuan yang 'bisa dipakai' maupun situs-situs kencan.

1 Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hal.103

2 Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), Jil I Edisi 2, hal.177

3 W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h.548

4 *Promiskuitas* adalah Hubungan seks secara bebas dan tidak acuan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki.

5 Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 3

6 Hull, T., Sulistyanyingsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997, hal 20

Nyata sudah bahwa jaringan virtual ini telah digunakan sebagai sarana memperdagangkan perempuan. Ini artinya, penjahat telah melirik teknologi informasi untuk menjalankan kejahatannya. Meski promosi dan penawaran PSK yang menggunakan media cetak masih tetap berkibar. Modus kejahatan transaksi seks lewat internet, menambah deret modus-modus kejahatan internet yang terjadi di Tanah Air. Perkembangan ini menarik. Pertama, hadirnya modus kejahatan dunia cyber ini, paling tidak akan tetap menempatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam tindak kejahatan teknologi informasi.

Cyber prostitution (prostitusi dunia maya) merupakan salah satu bentuk dari *cyber crime* yang dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah "Perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terwujud dalam kegiatan prostitusi melalui media internet. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional namun nyatanya *cyber crime* merupakan kejahatan yang bersifat transnasional sehingga penegakannya masih sulit dilakukan. Prostitusi *cyber* memiliki dampak lebih dari satu negara, hal ini disebabkan karena karakter *cyber liberty* (kebebasan di dunia maya) sehingga mudah diakses oleh *paranetter* di berbagai negara. Hal ini sesuai dengan karakter kejahatan transnasional yang melintasi batas negara.

Peraturan yang ada di Indonesia yaitu khususnya dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya sudah mampu untuk menggulung praktek prostitusi melalui dunia maya ini. Namun sayangnya dengan kendala keterbatasan yang ada pemerintah belum mampu untuk menutup situs-situs dunia maya yang jelas-jelas berbau praktek prostitusi. Memang dimasa sekarang, teknologi seperti mata pisau, yang satu dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Melihat kenyataan yang ada, menjadikan masalah ini sangat menarik untuk dikaji. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mampu untuk mengatasi permasalahan sosial di era globalisasi sekarang. Maka jurnal ini akan membahasnya dalam bentuk penelitian yang berjudul **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (CYBER PROSTITUTION) YANG ADA DI INDONESIA**. Dengan harapan masalah prostitusi ini segera bisa diatasi dan tidak berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana saat ini kesusilaan merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan.

B. Pembahasan

1. Respon Masyarakat dan Penyebab Terjadinya Prostitusi Online

Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu "dunia mayantara" (dunia yang tanpa batas) atau "realitas virtual" (*virtual reality*). sebagai bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet yang dalam istilah asing

disebut *Cyber Crime*.⁷ (Barda Nawawi Arief, 2006: 19) Catatan sejarah menunjukkan, beberapa kasus dugaan pornografi gagal dihukum karena saksi ahli di pengadilan berhasil meyakinkan hakim bahwa melanggar kesusilaan, sekalipun terbukti, tidak berarti pornografi.

Berikut adalah mata rantai dalam praktek prostitusi di dunia maya:

1. Mucikari

Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh"-nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara, perkembangan kajian cyber crime di Indonesia, Jakarta, raja grafindo persada hal.19

2. *Pekerja Seks Komersial*

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi obyek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.

3. *Pihak-pihak lain*

Disinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada dengan prostitusi melalui media online. Ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek asusila ini. Pihak-pihak ini adalah mereka yang menyediakan media-media yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya. Karena menggunakan media online seperti website, forum, aplikasi dan lainnya maka para pemilik dari website atau forum ini lah yang menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek prostitusi online ini. Tidak sampai disitu, pemilik *server*⁸ tempat para pemilik website ataupun forum menempatkan data-data mereka agar dapat diakses oleh siapa saja. Jadi sangat luas bagaimana mata rantai dari praktek prostitusi online ini sampai bisa terjadi.

4. *Pihak penyewa jasa PSK*

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak penyewa inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi online ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak penyewa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi online untuk menyewa PSK darinya. Setiap pelacur memiliki berbagai alasan untuk menerjuni profesi sebagai pelacur. Untuk menelusuri latar belakang seseorang menyambangi pekerjaan prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena masalah yang melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu ke sebab yang lainnya. Namun faktor-faktor yang ada dapat dibedakan secara garis besarnya, diantaranya:⁹ (Endang Sedyaningsih, 1999: 70)

1. Faktor Moral atau Akhlak

- a. Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan individu dan masyarakat serta ketidaktaawaan terhadap ajaran agamanya.
- b. Standar Pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah
- c. Berkembangnya pornografi secara bebas dan liar.

2. Faktor Ekonomi

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki keterampilan khusus, walau kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek sehingga menghalalkan pelacuran.

3. Faktor Sosiologis

- a. Ajakan dari teman-teman sederaahnya yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia pelacuran.
- b. Karena pengalaman dan pendidikan mereka sangat minim, akhirnya mereka dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan dari pria. Terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat pelacuran.

4. Faktor Psikologis

Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan dan mengalami seksual dalam keluarga serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal seperti kegagalan dalam perkawinan, dimadu, dinodai oleh kekasihnya yang kemudian ditinggalkan begitu saja.

8 di bahasa indonesia berarti peladen yakni sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer

9 Endang Sedyaningsih, Perempuan Keramat Tunggal, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999 hal.70

5. Faktor kemalasan

Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis dan mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

6. Faktor Biologis

Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu istri/suami.

7. Faktor Yuridis

Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar pernikahan akan tetapi dilarang dalam undang-undang adalah mucikari dan germo.

8. Faktor Pendukung

Adanya media atau alat pendukung dalam melakukan kegiatan prostitusi sangat mempengaruhi mereka yang bekerja dibidang ini. Dengan adanya teknologi pendukung seperti internet dan handphone membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.

Prostitusi atau pelacuran merupakan penyakit masyarakat yang semakin marak sekarang ini dan mempunyai sejarah panjang. Sejak adanya kehidupan manusia telah diatur norma-norma perkawinan, dan sejak saat itu pula pelacuran sebagai salah satu penyimpangan dari pada norma-norma perkawinan tersebut lahir dimana tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara didunia, tidak hanya di Indonesia. Walaupun prostitusi sudah ada sejak dulu, namun masalah prostitusi yang dulu dianggap tabu atau tidak biasa. Namun pada jaman sekarang, prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi sesuatu yang biasa dan hampir ada disetiap daerah, tidak hanya di kota – kota besar namun mencakup keseluruhan daerah terpencil sekalipun.

Norma-norma sosial jelas mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan sudah ada UU mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis yang terdapat dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), mereka yang mencari pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP). Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat. Meski demikian, perbuatan prostitusi masih ada, bahkan terorganisir secara profesional dan rapi, Tempat-tempat prostitusi di sediakan, di lindungi oleh hukum bahkan mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu. Konsumennya pun beranekaragam dari orang miskin sampai orang kaya. Dari kalangan pejabat sampai tingkat rakyat biasa pengemudi becak dan juga direktur. Hal ini merupakan PR bagi bangsa kita untuk mencari sebab-sebab yang merongrong seseorang itu untuk berbuat melacur. Sebab-sebab terjadinya pelacuran haruslah dilihat dan dicermati dari faktor-faktor endogen (dari dalam) dan eksogen (dari luar) serta banyak sekali alasan-alasan mengapa wanita dan gadis-gadis bahkan janda-janda memasuki pekerjaan kotor dan hina ini, akan tetapi alasan ekonomi dan psikologi lah yang paling menonjol dari semua alasan yang ada.

Sampai sekarang prostitusi belum bisa dihentikan secara merata oleh pemerintah, malah bahkan pemerintah seolah-olah melegalkan praktek ini. Prostitusi seperti sudah mendarah daging dan sulit untuk diputus dan dilepaskan dari para pelaku. Salah satu cara hanya dengan menekan laju praktek-praktek yang berbau prostitusi. Ada pendapat bahwa kehidupan bersama tanpa nikah sama artinya dengan prostitusi terselubung. Hal demikian dipandang sudah wajar dimata masyarakat karena prostitusi sudah ada sejak manusia itu ada. Akan tetapi hal itu menurut sebagian masyarakat adalah kontroversi dan merupakan pelanggaran terhadap norma baik terhadap norma agama, adat, sosial dan hukum.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi Cyber dengan Sarana Penal

1. Tindak pidana prostitusi melalui media online ditinjau dari hukum positif di Indonesia yaitu baik dalam KUHP maupun di luar KUHP ditetapkan sebagai kejahatan.

- a. Tindak pidana prostitusi ditinjau dari KUHP
Tindak pidana prostitusi sebagai bagian dari kejahatan kesopanan diatur dalam BAB XIV yaitu dalam Pasal 281-303, namun Pasal yang mengatur khusus mengenai pelacuran adalah Pasal 296, Pasal 297, dan Buku Ketiga BAB II sebagai bagian dari pelanggaran tentang ketertiban umum Pasal 506 karena dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat.
- b. Tindak pidana prostitusi online ditinjau dari luar KUHP
Di luar KUHP, tindak pidana prostitusi online diatur dalam UU RI No.11 Tahun 2008, UU RI No. 21 Tahun 2007, UU RI No.44 Tahun 2008 dan UU RI No. 23 Tahun 2002

Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang mengenai cybercrime. Model yang digunakan adalah Umbrella Provision (semacam payung untuk semua bentuk perundang-undangan) sehingga ketentuan cybercrime ada dalam perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Alternatif pemecahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Alternatif-alternatif tersebut adalah sebagai berikut: 1) cyberlaw sebagai umbrella provision, Mengingat ketentuan ini merupakan ketentuan pidana khusus, maka aturan main yang bersangkutan dengan prinsip atau asas-asas umum diatur secara tersendiri.

Jika ketentuan cybercrime tidak mengatur secara tersendiri mengenai prinsip atau asas-asas umum itu, maka apakah ketentuan umum dalam Buku I KUHP dapat diberlakukan padanya, mengingat sifat yang berbeda dari virtual reality dan real life. Ini berarti ada pemisahan antara ketentuan pidana yang berlaku untuk kegiatan di cyberspace atau dunia maya (KUHP Cyberspace) dan ketentuan pidana yang mengatur kegiatan di kehidupan nyata (KUHP seperti yang sekarang ada). 2) Jika yang ingin dikembangkan adalah KUHP-nya (yang sekarang dilakukan dengan penafsiran) atau dalam KUHP mendatang dengan memperluas penafsiran yang dapat menjangkau kegiatan di cyberspace, maka ketentuan pidana di cyberlaw atau peraturan tersendiri mengenai cybercrime tidak diperlukan karena KUHP merupakan kodifikasi dari hukum pidana. Jika model ini yang diambil/dianut, maka harus dikembangkan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan perkembangan cyberspace yang begitu cepat, yaitu dengan melakukan amendemen. Dengan demikian, antara dunia nyata (real life) dan dunia maya hanya ada 1 (satu) ketentuan pidana yang mengatur kegiatan di kedua dunia tersebut.

Mengenai hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana merupakan ciri khas yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain. Hukum dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur¹⁰ (Leden Marpaung, 2008: 105)

3. Upaya Non Penal Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan cyber crime, memperbaiki sistem pengamanan komputer, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet.

Maraknya jumlah website yang menyediakan konten pornografi yang meningkat hingga 70 persen. Bahkan setiap harinya sebanyak 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan ada 372 juta halaman website pornografi menimbulkan kendala bagi Kementrian Kominfo melakukan

10 Leden Marpaung, 2008, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 105.

pemantauan, pencegahan dan pemblokiran terhadap situs-situs porno¹¹ (<http://www.antaranews.com/berita/1267024044/internet-sehat-kurangipenyalahgunaanjejaring-sosial>, diakses tanggal 15 April 2013, Pukul 16.30 WIB).

Perkembangan internet membuka akses seluas-luasnya bagi semua pihak untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dengan mudah, murah dan cepat, tak terkecuali anak-anak remaja. Di sisi lain, tidak semua pengguna internet mempunyai niat yang baik dan ini sudah terbukti dari data yang ada yang menggambarkan internet dipakai untuk menipu, membujuk dan akhirnya digunakan untuk memperdagangkan anak maupun remaja putri

untuk tujuan eksploitasi seksual dan prostitusi online. Terlebih saat ini semakin merebaknya pelacuran melalui situs internet

Faktor yang menyebabkan prostitusi online semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu dalam skripsi ini memaparkan 5 faktor penyebab terjadinya pelacuran, yakni:

1. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kemiskinan.
3. Keinginan cepat kaya (materialistic)
4. Faktor budaya
5. Lemahnya penegakan hukum

Upaya non penal yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi online selain daripada diatas, juga dapat dilakukan sebagai berikut:

1. *Pendekatan Teknologi (Techno Prevention)*

Menurut Volodymyr Golubev, banyak aspek dari kasus-kasus cyber crime yang terjadi akibat lemahnya perlindungan informasi daripada diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu diberikan lebih banyak informasi mengenai kelemahan/kerentanan dari sistem komputer dan sarana perlindungan yang efektif.¹² (Barda Nawawi Arief, 2006: 3-5) Dalam konteks cyber crime erat hubungannya dengan teknologi, khususnya teknologi komputer dan telekomunikasi sehingga pencegahan cyber crime dapat digunakan melalui saluran teknologi atau techno prevention.

2. *Pendekatan Budaya/Kultural*

Perlunya pendekatan budaya.kultural dalam kebijakan penanggulangan cyber crime, untuk membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah cyber crime dan menyebarkan atau mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan. Pentingnya pendekatan budaya ini khususnya upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (codes of behaviour and ethics), terungkap juga dalam pernyataan IICC (International Information Industry Congress) sebagai berikut:¹³ (Agus Raharjo, 2002: 246)

"IICC members are also committed to participate in the development of codes of behaviour and ethics around computer and internet use, and in campaign for the need for ethical and responsible online behavior. Given the international reach of internet crime, computer and internet users around the world must be made aware of the need for high standards of conduct in cyber space."

3. *Kerjasama Internasional*

Kerjasama internasional yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan cyber crime adalah perjanjian ekstradisi, mutual assistance in criminal matters, pemberian informasi secara spontan, dan pembentukan jaringan yang dikelola oleh tenaga-tenaga profesional dalam rangka menjamin terselenggaranya bantuan secepatnya untuk investigasi dan peradilan untuk investigasi dan peradilan untuk pengumpulan alat bukti elektronik.Sifat cyber crime adalah transnasional, karena itu diperlukan kerjasama internasional yang intensif baik dalam penegakan hukum pidana maupun dalam bidang teknologi berupa pembentukan jaringan informasi yang

11 <http://www.antaranews.com/berita/1267024044/internet-sehat-kurangipenyalahgunaanjejaring-sosial>, diakses tanggal 15 April 2013, Pukul 16.30 WIB

12 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara:Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 3-5

13 Agus Raharjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 246

kuat, misalnya program “24 hours point of contact” untuk menghadapi kejahatan cyber crime, pelatihan personil penegak hukum yang memadai, harmonisasi hukum dan penyebarluasan kesepakatan-kesepakatan internasional. Penyelerasan hukum pidana materil yang mengatur tentang cyber crime merupakan inti dari kerjasama internasional, yang diharapkan diperoleh dari penegak hukum dan kewenangan pengadilan dari negara yang berbeda.

4. *Peranan Penyedia Jasa Internet dan Pemilik Website*

Satu langkah lagi agar penanggulangan cyber crime ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan kerjasama dengan Internet Service Provider(ISP) atau penyedia jasa internet. Meskipun Internet Service Provider (ISP) hanya berkaitan dengan layanan sambungan atau akses internet, tetapi Internet Service Provider (ISP) memiliki catatan mengenai ke luar atau masuknya seorang pengakses, sehingga ia sebenarnya dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan kejahatan itu dengan melihat log file yang ada. Oleh sebab itu untuk menanggulangi cyber crime dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan kerjasama dengan Internet Service Provider (ISP) atau penyedia jasa internet.

5. *Pengawasan Orang Tua*

Anak-anak adalah sasaran utama dari bentuk-bentuk kejahatan onlinetampa pengawasan dari orang tua yang cenderung kurang memahami teknologi. Disinilah peran orang tua yang ikut mengawasi dan memberikan batasan-batasan penggunaan media online, seperti handphone, tablet, komputer, dan sebagainya. Orang tua juga harus mengawasi anak-anaknya dalam melakukan aktivitas secara online, melindungi keamanan anak-anak selama melakukan aktivitas secara online terutama bila mereka memanfaatkan fasilitas chatting, home pages, facebook dan sebagainya dan menjaga keamanan informasi pribadi anak-anak.

6. *Pendekatan Sosial*

Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya hukumnya dengan cara pencegahan tindak pidana cyberporn melalui pendekatan sosial antara lain:

a. Sekolah

Pendidikan memainkan peran yang penting untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sekolah mempunyai peranan yang integral dalam proses sosialisasi sehingga dapat memberikan pengaruh positif untuk menghambat penyimpangan perilaku di kalangan anak-anak muda. Kurikulum penggunaan internet yang efektif pun semestinya dapat dijadikan standar pengajaran, terutama dalam bidang-bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Masyarakat dan Lingkungan

Untuk mencapai tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas pornografi, harus ada kompromi antara komunitas dunia maya. Masyarakat berkeinginan agar pornografi di internet dapat ditekan sehingga dampak buruk yang muncul tidak akan membahayakan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

C. Kesimpulan

Norma-norma sosial jelas mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan sudah ada UU mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis yang terdapat dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), mereka yang mencari pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP).

Indonesia saat ini secara penal telah memiliki Undang-Undang mengenai cybercrime. Model yang digunakan adalah Umbrella Provision (semacam payung untuk semua bentuk perundang-undangan) sehingga ketentuan cybercrime ada dalam perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan cyber crime, memperbaiki sistem pengamanan komputer, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet.

D. Saran

Komitmen moral merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online sebab tanpa adanya komitmen tersebut penegakan hukum tidak mungkin dilakukan. Format pidana penjara dan denda maksimal yang dijatuhkan kepada mucikari online perlu lebih ditegaskan sebagai upaya represif dan preventif agar kejahatan ini tidak terulang kembali.

Mengingat faktor yang paling mempengaruhi lemahnya penegakan hukum terhadap prostitusi melalui media online adalah faktor penegak hukum maka diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum baik dalam penguasaan terhadap hukum informasi dan transaksi elektronik (ITE) maupun penambahan terhadap sarana dan fasilitas IT untuk lebih cepat dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online. Pola perilaku dari penegak hukum juga perlu agar senantiasa menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu juga diperlukan penambahan jumlah ahli IT pada institusi penegak hukum.

Bagi pemerintah sendiri dengan adanya pembahasan mengenai perbandingan serta pertanggungjawaban dari pelaku dari tindak pidana prostitusi secara *online* ini, diharap pemerintah segera merevisi beberapa Pasal yang telah disebutkan atau segera menyelesaikan RUU KUHP supaya RUU KUHP tersebut dapat menjadi hukum positif. Bagi aparat penegak hukum, bahwa tindak pidana berupa prostitusi secara *online* ini perlu dicermati secara komprehensif kembali, mengingat sebenarnya tindak pidana prostitusi secara *online* ini sebenarnya dapat dikenai pasal berlapis berdasarkan perundang-undangan yang berbeda.

Daftar Pustaka

Buku

- Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 246
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*, Jakarta, raja grafindo persada hal.19
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara:Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 3-5
- Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak*, jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1999 hal.70
- Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997, hal 20
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), Jil I Edisi 2,hal.177
- Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 105.
- Lexy Moelowong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002),hal.103
- Noach, Simanjuntak dan Pasaribu, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984.
- R. Soesilo, *Kriminologi*, Poletia, Jakarta, 1982.
- Ramli Atmasasmita, Prof. Dr. SH, MS, *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992
- Sutherland Edwin, *AZAS-AZAS KRIMINOLOGI*,Bandung :Alumni, 1973.
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 3
- W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN BalaiPustaka, 1984), hal.548

Jurnal dan Artikel

<http://www.antaraneews.com/berita/1267024044/internet-sehat-kurangipenyalahgunaanjejaring-sosial>, diakses tanggal 15 April 2013, Pukul 16.30 WIB

www.kompas.com

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia